

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit masalah pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintahan. Walikota merupakan pemimpin yang ditunjukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Dan yang menjadi urusan dari pemerintah pusatnya sendiri adalah moneter, kebijakan luar negri, pertahanan keamanan, dan agama selain dari itu merupakan perhatian dari daerah (DPRD).

Teknologi saat ini telah mengubah cara organisasi publik untuk berhubungan dengan publik. Pada bidang akuntansi sendiri penggunaan teknologi sudah banyak dipakai terutama dalam menyajikan laporan keuangan. Karena banyaknya masalah-masalah yang terkadang sering muncul dalam penyajian laporan keuangan yang dialami oleh organisasi baik perusahaan swasta (nonpublik) dan pemerintahan (publik) seperti masalah yang biasa terjadi antara lain keterlambatan waktu pelaporan, akurasi, dan realibilitas dan kelemahan akan kemampuan yang disebabkan oleh faktor intern itu sendiri. Pemerintahan Daerah merupakan salah satu organisasi yang berkepentingan dengan teknologi informasi karena dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi yang tentu saja bisa diharapkan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaporan

Novia Widuri, 2012

Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dalam Menunjang *Good Government Governance*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

keuangan, pengaturan mengenai informasi keuangan daerah telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang telah melakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang SIKD yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, menadministrasikan, serta mengelolah keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (pasal 15).

Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. SIKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah Departemen Keuangan dengan Pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya. SIKD menyajikan berbagai informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan. Data keuangan utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Fenomena yang terlihat baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar menyampaikan Pemprov Jabar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2011. Menurut Slamet Kurniawan selaku ketua BPK Jabar neraca, laporan realisasi dan arus kas serta catatan dalam semua hal material telah disajikan wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Suara Merdeka, 2012) dengan begitu dewasa ini pemerintah telah mengusahakan untuk menerapkan sistem aplikasi yang memudahkan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan mempublikasikannya pada masyarakat.

Akan tetapi, keberhasilan Pemprov Jabar mendapat opini WTP tersebut disisi lain terdapat kondisi yang kurang sesuai dalam penerapan SIKD di Pemprov Jabar. Hal tersebut diperoleh dari pra penelitian yang dilakukan di Pemprov Jabar, dimana menurut salah satu sumber disebutkan bahwa penerapan SIKD masih belum maksimal, sebagaimana dalam uraian berikut:

“SIKD telah diterapkan di pemerintahan khususnya di pemerintah provinsi Jawa Barat, namun pada kenyataannya SIKD di Provinsi Jawa Barat baru dimanfaatkan 50 persen saja dan karena baru penatausahaan dan laporan realisasi anggarannya. Sedangkan untuk laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan harus secara manual.”

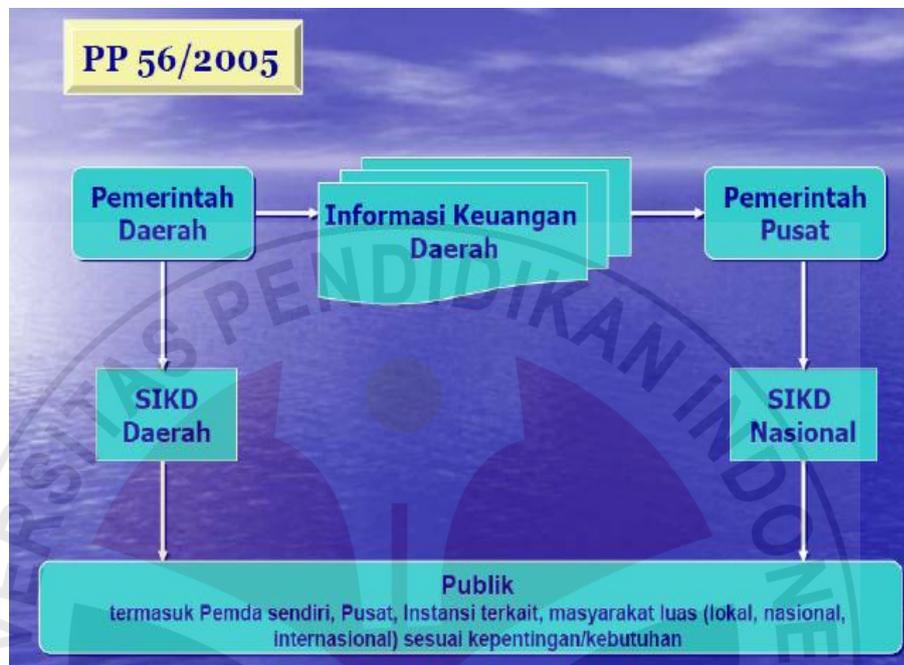
Ini sebagai petunjuk awal bahwa masih ada kelemahan-kelemahan dalam penerapan SIKD dan faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan SIKD. Dalam SIKD yang telah diterapkan di Pemprov Jabar laporan keuangannya masih ada yang dikerjakan secara manual. SIKD merupakan salah satu aplikasi teknologi informasi yang sekarang digunakan di lembaga pemerintah baik di tingkat propinsi maupun kota/kabupaten. Dalam penerapan SIKD pasti akan berkaitan

satu sama lain karena melibatkan suatu sistem teknologi informasi yang didalamnya terdapat segala urusan pemerintahan terintegrasi dalam suatu sistem, khususnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang menyebabkan SIKD dalam penerapannya memungkinkan akan terjadi suatu kombinasi yang cukup kompleks dan intensif antara orang dan pengguna, hardware, software, data, dan prosedur. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Howpood, 1995).

Dimana pengaruh sumber daya manusia pun bisa menunjukkan apakah informasi telah sesuai dengan keinginan publik atau masyarakat. Penyelenggaran SIKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIKD Nasional. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana SIKD masing-masing daerah nantinya akan menjadi sumber dari SIKD nasional.

Gambar 1.1

SIKD Pada Masing-masing Daerah yang Akan Menjadi Sumber SIKD Nasional



Sumber: Subdit Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan

Untuk mencapai pemerintahan yang ideal, tentu praktik GGG perlu diterapkan dalam setiap aspek pemerintahan, tidak terkecuali masalah keuangan. Empat prinsip dalam GGG menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* diantaranya keadilan, transparansi, dapat dikontrol dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan bantuan SIKD karena SIKD memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh salah satu pegawai di Pemprov bahwa SIKD merupakan alat pertanggungjawaban dimana salah satunya untuk mengevaluasi laporan keuangan dengan efisien dan efektif dimana sesuai dengan tujuan dari GGG. Hakikatnya penyelenggaraan pemerintah atau pemerintahan ditunjukkan kepada terciptanya pelayanan publik.

Novia Widuri, 2012

Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dalam Menunjang *Good Government Governance*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Pada Peraturan Pemerintah (PP) 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah melakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 dimana pemerintah telah menerapkan sistem tersebut diharapkan dapat membantu kepala daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik atau *Good Government Governance*. Implementasi *Good Government Governance* dalam pemerintahan secara sederhana adalah menerapkan prinsip *Good Government Governance* kedalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. Karena apabila dihubungkan dengan kedua pemahaman tersebut, maka seharusnya sistem informasi keuangan daerah merupakan solusi bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat. Karena dalam sistem informasi keuangan daerah diatur bagaimana informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah harus dibuat untuk diinformasikan kepada masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil paparan di atas peneliti ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam pada penerapan SIKD di Pemprov Jabar. Apakah dengan diterapkannya SIKD ini dapat mendorong pemerintah dalam mewujudkan prinsip *Good Government Governance*. Karena seharusnya dengan adanya aplikasi ini pemerintah dapat terbantu dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian ini pun melanjutkan penelitian sebelumnya dari Rudy Kurniawan (2010) yang berjudul “Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Good

Governance” dimana peneliti sebelumnya menyarankan untuk mengadakan penelitian setelah diterapkannya SIKD apakah dapat mewujudkan prinsip dari *Good Government Governance* dan hubungan SIKD dengan *Good Government Governance* itu seperti apa. Dan hasil pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa dalam penerapan SIKD ini apabila telah dilaksanakan dengan baik maka, sistem ini dapat menjadi daya dorong untuk menuju tat pemerintahan yang baik, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti tidak hanya menfokuskan pada saat diterapkannya SIKD, tetapi juga melakukan penelitian usaha apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam mengatasi permasalahan tersebut dan faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan SIKD, dan peran SIKD dalam mewujudkan GGG.

Namun dalam penerapannya SIKD apakah benar-benar telah terasa manfaat penggunaan SIKD terutama dalam mewujudkan prinsip *Good Government Governance* pada pemerintah provinsi Jawa Barat, disini peneliti mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi dimana dalam penelitian kualitatif akan memperoleh hasil temuan informasi ataupun data yang baru yang berkaitan dengan tema yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini bukan data kuantitatif sehingga tidak ada alat ukur yang dapat digunakan, oleh karena itu penulis menggunakan metode kualitatif. Dimana pada peneliti ingin melanjutkan penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif karena pada penelitian sebelumnya, dan peneliti ingin jauh lebih memahami lebih dalam lagi tentang penerapan SIKD dalam mewujudkan prinsip GGG dimana terdapat fungsi yang sama antara SIKD dan GGG. Dengan

metode penelitian kualitatif masalah yang berkaitan dengan permasalahan di atas akan dapat diungkapkan, maka dari itu penulis memberi judul penelitian ini **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dalam Menunjang *Good Government Governace* (GGG)” (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat).**

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan yang saya buat ini mencapai sasaran yang tepat maka yang dijadikan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan SIKD di Pemrov Jabar belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal?
2. Usaha apa yang telah dilakukan Pemrov Jabar dalam mengatasi kelemahan penerapan SIKD?
3. Bagaimana peran SIKD dapat mewujudkan prinsip GGG?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta, mengkaji dan meneliti data dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan SIKD dalam mewujudkan prinsip *Good Government Governance* dan laporan keuangan apa saja yang disajikan pada SIKD.

Novia Widuri, 2012

Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dalam Menunjang *Good Government Governance*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan penerapan SIKD tidak berjalan secara maksimal, dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya dari Pemrov Jabar setelah diterapkannya SIKD tapi pada kenyataannya masih terdapat kelemahan-kelemahan pada aplikasinya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan SIKD belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.
2. Mengetahui usaha yang dilakukan Pemerintah Pemrov bahwa masih terdapat kelemahan pada penerapan SIKD.
3. Mengetahui peran SIKD dalam mewujudkan prinsip GGG yang diantaranya meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menganalisis penerapan SIKD pada pelaporan keuangan di Pemrov Jabar sehingga SIKD ini dilaksanakan dengan sebaiknya, tentunya sistem ini dapat menjadi daya dorong untuk menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Begitu juga Pemerintah dapat memanfaatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) ini sebagai salah satu kemajuan teknologi dalam meningkatkan sistem manajemen

dan proses kerja pemerintah terutama dapat menjadi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di mata masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau memperluas pengetahuan peneliti dan pembaca serta dapat menjadi bahan tambahan pengembangan wawasan di bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi serta acuan bagi penelitian selanjutnya.